



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"

KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./ Fax. (021) 3842526 www.kominfo.go.id

Jakarta, 20 Februari 2017

Nomor : 29 /Kominfo/BLSDM/LT.03.07/02/2017
Lampiran :
Perihal : Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Bidang Informatika
Kementerian Kominfo Tahun 2017

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di -

Tempat

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, Kementerian Kominfo pada Tahun Anggaran 2017 kembali akan melaksanakan Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Bidang Informatika yang telah dikembangkan sejak tahun 2007.

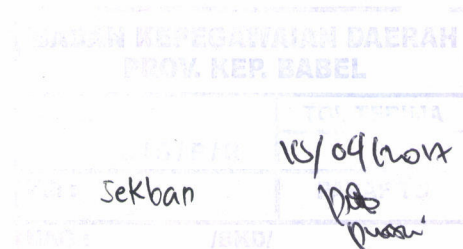
Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah Pusat dan Daerah (kecuali PNS Guru dan Dosen), anggota TNI/ Polri;
- Berusia maksimum 37 tahun pada saat mendaftarkan diri;
- Berstatus PNS dan TNI/Polri aktif dan telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- Mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II) di instansi yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan;
- Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
- Persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing Perguruan Tinggi yang dipilih.

Program studi yang dibiayai melalui Program Beasiswa ini adalah:

- Program Studi S2 Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintahan (MTI e-Government)

Program Beasiswa untuk bidang studi ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan SDM aparatur pemerintah yang unggul dalam pengembangan e-Government di lingkungan instansi pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Sasaran program adalah tersedianya SDM pengelola e-Government di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.



Program Beasiswa S2 ini dilaksanakan bekerjasama dengan Program Studi di 4 (empat) Perguruan Tinggi, yaitu:

- a. Program Studi MTI konsentrasi e-Government Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada (UGM);
- b. Program Studi Layanan Teknologi Informasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI – ITB);
- c. Program Studi Pengelola TIK Pemerintahan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
- d. Program Studi MTI e-Government Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI).

2. Program Studi Keamanan Informasi

Program Beasiswa untuk bidang studi ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan SDM aparatur pemerintah yang unggul dalam menjamin keamanan informasi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau Transaksi Elektronik di lingkungan instansi pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sasaran program adalah tersedianya SDM Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang dapat menjamin keamanan informasi.

Program Beasiswa S2 ini dilaksanakan bekerjasama dengan 2 (dua) Program Studi, yaitu:

- a. Rekayasa dan Manajemen Keamanan Informasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI – ITB);
- b. Manajemen Keamanan Jaringan Informasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI).

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa ini adalah tugas dan fungsinya terkait dengan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di instansi yang bersangkutan. Pemenuhan persyaratan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ), dan Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi yang sudah menjabat atau Surat Penempatan dari Unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing instansi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait.

Program Beasiswa dikembangkan dengan skema *cost sharing*, yang mana Kementerian Kominfo menanggung biaya pendidikan sesuai dengan SPP yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi selama masa studi normal berlangsung dan biaya operasional yang diberikan sebagai bantuan tambahan biaya perkuliahan dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan instansi pengirim bertanggung jawab untuk biaya hidup dan biaya lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menyebarkan informasi ini kepada seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan di lingkungan instansi dan mengintergrasikan Program kami ini dalam perencanaan Pengembangan SDM di lingkungan instansi Bapak/Ibu.

Keterangan terkait, jadwal rencana kegiatan sosialisasi dan seleksi awal di daerah, prosedur pendaftaran, jadwal pendaftaran, dan seleksi Program Beasiswa lebih lanjut dapat dilihat pada situs web resmi masing-masing Perguruan Tinggi, dan keterangan lebih lanjut terkait

penyelenggaraan Program Beasiswa dapat dilihat pada situs web <https://litprofinformatika.kominfo.go.id/beasiswa> atau dapat menghubungi Sekretariat Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Bidang Informatika Kemkominfo melalui email beasiswadninformatika@gmail.com atau telepon (021) 3846189 (Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Litbang SDM
Kementerian Kominfo,**



Basuki Yusuf Iskandar

Tembusan Yth.
Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai Laporan)

LAMPIRAN : SURAT KEPALA BADAN LITBANG SDM
NOMOR : 29 /KOMINFO/BLSDM/LT.03.07/02/2017
TANGGAL : 20 Februari 2017

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Pemerintah Pusat (Kementerian/Non-Kementerian/Komisi/Dewan/Badan);
2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia;
3. Kepala Biro SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di seluruh Indonesia;
4. Asisten Personel (Aspers) Kepala Staf TNI Angkatan Darat/Laut/Udara.